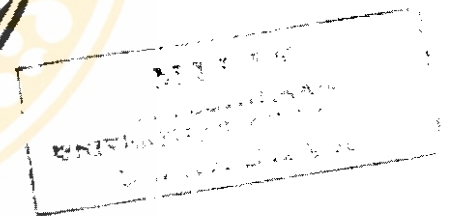


**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG TERHADAP TINGKAT  
PARTISIPASINYA DALAM PROSES PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**

1111  
J.W. AM 20/01  
Swt  
P



**OLEH :**

**WAWAN SUTOPO**

**079615168**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GENAP 2000/2001**

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG TERHADAP TINGKAT  
PARTISIPASINYA DALAM PROSES PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**OLEH :**

**WAWAN SUTOPO**

**079615168**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GENAP 2000/2001**

Setuju untuk diujikan,

Surabaya, 25 Mei 2001

Dosen Pembimbing



Drs. Gitadi Tegas Supramudyo, Msi.

NIP : 131569363

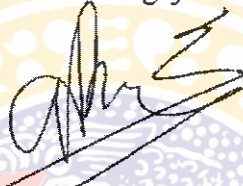


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji pada Hari Jum'at

Tanggal 15 Juni 2001 Pukul 09.30 WIB di Ruang 250

Panitia penguji terdiri dari :

Ketua Penguji



Drs. Soenyoto Rais, MA.

NIP. 130324137

Anggota



Drs. Gitadi Tegas S., Msi.

NIP. 131569363

Anggota



Drs. Roestoto HP., SU.

NIP. 130783545

## ABSTRAKSI

Era Otonomi Daerah yang di mulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa era baru bagi Daerah. Wewenang Pemerintah Daerah menjadi sangat luas untuk mengurus Daerahnya masing-masing Begitu juga dengan DPRD yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai kedudukan yang terpisah dari Pemerintah Daerah menyebabkan kedudukan mereka lebih kuat jika dibandingkan Pemerintahan Daerah sebelumnya. Hal ini sangat memberi peluang terlaksananya secara optimal terhadap fungsi utama DPRD yakni pembuatan Peraturan Daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah. Apalagi mereka juga memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menjadikan kedudukan mereka semakin kuat terhadap Pemerintah Daerah.

Namun Kedudukan yang kuat dan wewenang yang luas dari DPRD tidak secara otomatis membuat peranan anggota dewan menjadi optimal dalam menjalankan fungsinya khususnya fungsi dalam pembuatan Peraturan Daerah. Mereka memang terlihat lebih aktif terutama dalam mengkritisi segala perilaku eksekutif dan lebih berani dalam mengajukan ide, gagasan dan masukkan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Namun keaktifan tersebut belum diimbangi dengan kualitas yang memadai dari ide, gagasan dan masukkan serta kritikan. Dan keaktifan tersebut bisa lebih dipahami sebagai akibat konstelasi politik yang memberikan peluang yang luas untuk keaktifan itu. Dalam beberapa kasus mereka cenderung mengedepankan hak dan kepentingan pribadi mereka dibanding kewajibannya yang harus dipenuhi sebagai anggota legislatif.

Seiring dengan adanya dugaan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman yang relatif tetap dibanding sebelumnya tersebut yang membuat belum optimalnya peranan anggota dewan selama ini dalam proses pembuatan Peraturan Daerah maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui belum optimalnya fungsi DPRD khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah. Penelitian seperti yang dimaksud adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan dan pengalaman anggota DPRD terhadap tingkat partisipasinya dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan seberapa besar hubungan di antara kedua variabel tersebut. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang mengarahkan penelitian ini yang selanjutnya akan diuji kebenarannya adalah **“semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman anggota DPRD maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam proses pembuatan Peraturan Daerah”**.

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sampel yang diambil adalah anggota DPRD Kabupaten Jombang dengan pertimbangan bahwa variabilitas populasi relatif rendah serta adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Metode analisis yang digunakan yaitu



metode kuantitatif dengan alat uji korelasi Rho Spearman pada taraf signifikansi 0,01 atau 1 %.

Setelah data hasil penelitian terkumpul dan kemudian dilakukan analisis dengan korelasi Rho Spearman, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel tergantung yang ditandai dengan koefisien korelasi yang sangat tinggi dari hasil analisis. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis yang tersebut di atas diterima atau terbukti di lapangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi anggota DPRD berdasarkan hasil penelitian benar-benar dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman dari anggota dewan itu sendiri.

Menilik hasil analisis itu maka untuk waktu yang akan datang perlu diprioritaskan adanya perbaikan terhadap tingkat pendidikan dan pengalaman anggota DPRD. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui seleksi yang ketat terhadap calon anggota legislatif oleh partai politik dengan mempertimbangkan terutama dari tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman dari calon. Tuntutan itu sangat wajar adanya, karena dimasa yang akan datang permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin rumit dan kompleks, sehingga membutuhkan kemampuan yang memadai dari wakil-wakilnya yang duduk di legislatif guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

